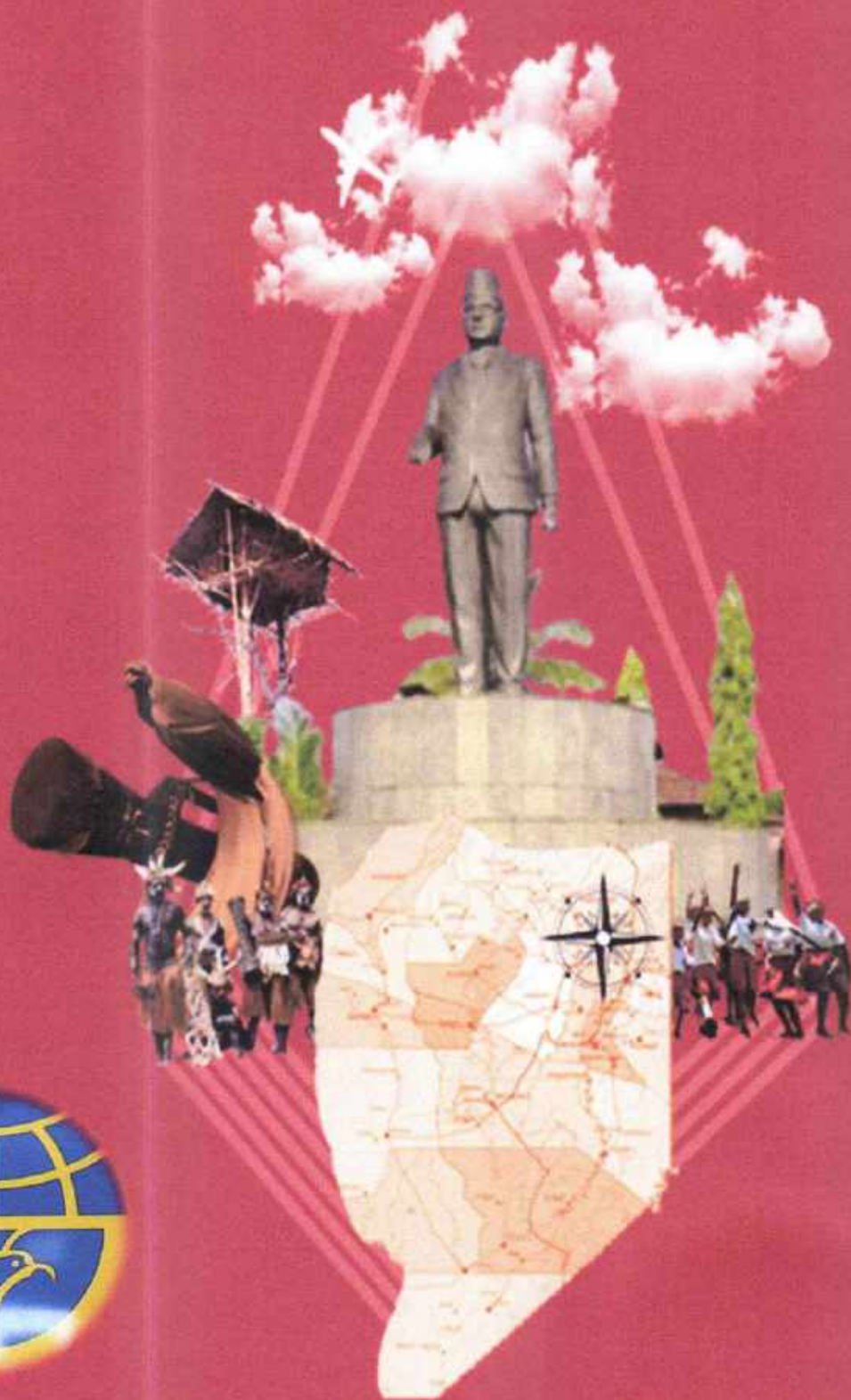


PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2022



RENSTRA
Rencana Strategis

DINAS
PERHUBUNGAN
2021-2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 – 2025 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat program dan kegiatan untuk mendukung program Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan Dinas Perhubungan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA Kementerian Perhubungan serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan seluruh perhatian dan tenaganya dalam mewujudkan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan periode 2021-2025.

Semoga, apa yang akan kita laksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digoel khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Tanah Merah, 09 November 2022

Kepala Dinas Perhubungan,



LUSIUS APAYMAN, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720603 200112 1 005

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAHII-1	
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.II-1	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Uraian Tugas	II-2
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	II-6
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	II-6
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-7
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-10
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	
(PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA).....	III-2
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	III-6
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD.....	IV-1
4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1	
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	VI-4
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-16	
BAB VIII.....	PENUTUP
VIII-21	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan dalam struktur organisasi yang ada. Pemikiran yang mendasari konsep perencanaan strategis adalah menghubungkan isu-isu strategis yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan serta konstrain sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan dan peralatan serta fasilitas terkait. Perencanaan strategis sedapat mungkin juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang luas untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Dinas Perhubungan akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai dalam waktu yang ditentukan; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara legal formal, penyusunan dan penetapan RENSTRA-Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 merupakan bagian terintegrasi dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025. Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RENSTRA OPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan: pembentukan tim penyusun RENSTRA, orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA serta pengumpulan data dan informasi.

- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir RENSTRA dilakukan dengan tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA OPD; dan
- c. Tahapan penetapan RENSTRA OPD

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2021-2025 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari :


1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Boven Digoel tahun 2021-2025 dan Renja OPD. RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- 
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006- 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan adalah merancang perencanaan strategis pembangunan di bidang urusan Perhubungan selama periode tahun 2021-2025, yang selanjutnya berfungsi untuk:

1. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang Perhubungan;
2. Pedoman strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang urusan Perhubungan sesuai dengan amanat Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan;
3. Penjabaran dan uraian teknis dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 di tingkat urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Dokumen RENSTRA PD ini adalah Merancang komponen-komponen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2026, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu isu strategis pembangunan daerah yang mengemuka di bidang Perhubungan;
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di bidang urusan Perhubungan;
3. Merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan Perhubungan;
4. Merumuskan Program, Kegiatan, subkegiatan dan plafon anggaran pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di bidang urusan Perhubungan;
5. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah di bidang urusan Perhubungan selama periode tahun 2021-2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi;

- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perhubungan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis;
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Perhubungan dalam lima tahun mendatang;
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Perhubungan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025;
- BAB VIII. Penutup**, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Perangkat Daerah.

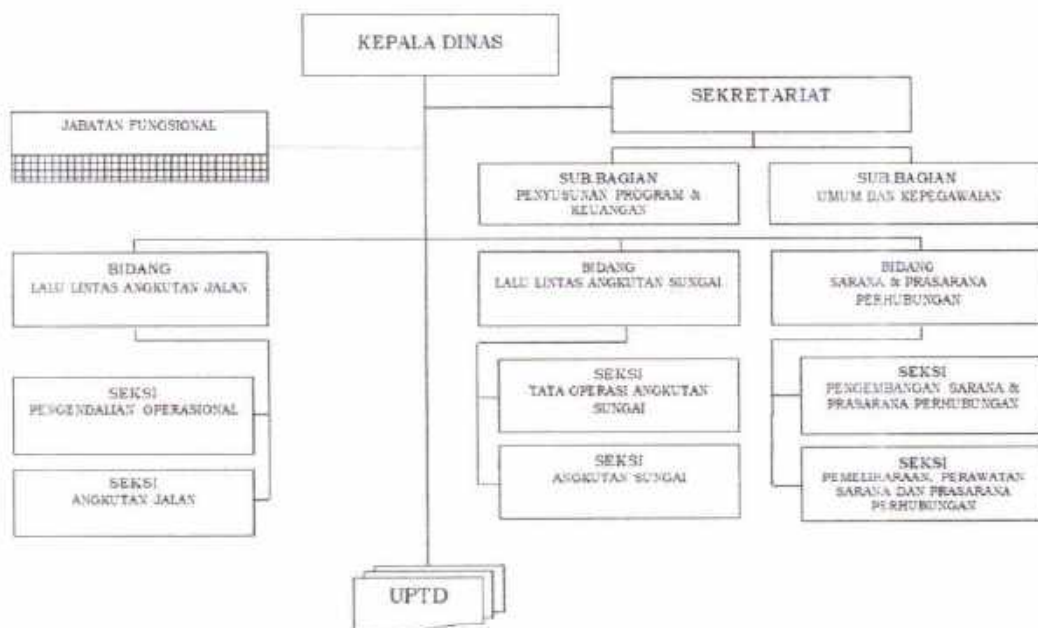
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, susunan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel terdiri atas:



2.1.2 Uraian Tugas

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. merumuskan pengkoordinasian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- g. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- i. merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- j. merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
- c. perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
- d. penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
- e. pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
- f. pembinaan dan pengasawan penyelenggara angkutan penumpang dan barang;
- g. pengumpulan dan penyiapan bahan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengumpulan dan penyiapan bahan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;

- i. penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan, serta bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan;
- j. penyusunan dan penetapan trayek angkutan penumpang dan jaringan lalu lintas angkutan barang;
- k. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- l. pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang type C;
- m. pelaksanaan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;
- n. pelaksanaan pembinaan pemantauan penilaian dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- o. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- p. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi/persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- q. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
- r. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- s. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- t. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- u. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- v. penerbitan/pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- w. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- x. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
- y. perumusan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- z. perumusan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- aa. perumusan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;
- bb. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- dd. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayaran dan pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Sungai;

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai. menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- c. perumusan pemberian izin trayek Angkutan Sungai;
- d. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
- e. perumusan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
- f. perumusan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Sungai dalam wilayah Kabupaten;
- g. perumusan penyusunan rencana umum jaringan sungai;
- h. perumusan lokasi pelabuhan sungai;
- i. perumusan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai;
- j. perumusan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai;
- k. perumusan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
- l. perumusan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai;
- m. perumusan pengawasan pengoperasian angkutan sungai;
- n. perumusan penetapan tarif angkutan sungai kelas ekonomi dalam kabupaten;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sarana dan prasarana perhubungan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan;
- b. penyusunan bahan rencana pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal, pelabuhan lokal, perparkiran dan alat penerangan jalan;
- d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang sarana dan prasarana Perhubungan;
- e. penetapan lokasi pembanguan terminal type C;
- f. penetapan lokasi pembangunan Helly Pad;
- g. penetapan titik lokasi rencana pembangunan bandara perintis;
- h. pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal;
- i. pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai;
- j. memberikan rekomendasi/penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- k. memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- l. memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- m. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal, pelabuhan lokal, helly pad, perparkiran dan alat penerangan jalan kabupaten;
- n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana Perhubungan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan mitra kerja/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sarana dan prasarana Perhubungan;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel memiliki pegawai sebanyak 96 orang. Rincian pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan dilingkungan Dinas Perhubungan, sebagaimana table di bawah ini :

1) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Golongan			Jml (orang)
		IV	III	II	
1	ASN	4	18	29	51
2	Tenaga Kontrak Tidak Tetap	-	-	-	44
Jumlah					95

2) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah (orang)
		ASN (orang)	Tenaga Kontrak (orang)	
1.	S2	3	-	3
2.	S1/ DIV	15	5	20
3.	DIII	5	2	7
4.	DII	-		
5.	SLTA	28	36	64
6.	SLTP		1	1
Total		51	44	95

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kab. Boven Digoel

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan dalam menunjang pelaksanaan urusan Perhubungan dapat disajikan sebagai berikut :

1) Sarana

Tabel 2.1
Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Jabatan	1	Unit	-	-	✓
2	Mobil Patroli LLAJ	1	Unit	-	-	✓
3	Mobil Operasional	3	Unit	✓	✓	-
4	Bus	5	Unit	✓	✓	-
5	Motor Dinas	30	Unit	✓	✓	✓
6	Speed Boat	1	Unit	-	✓	-

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dishub Kab. Boven Digoel

Tabel 2.2.

Sarana Gedung Kantor dan Sarana Pendukung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gedung Kantor	1	Unit	✓	-	-✓	Status Pinjam Pakai
2	Gedung Pos Pelabuhan Tanah Merah	1	Unit	✓	-		
3	Gedung Pos LLAJ/LLAS Asiki	1	Unit	-	✓	-	
4	Gedung Pos Pelabuhan Ikisi	1	Unit	✓		-	
5	Gedung Ruang Tunggu Dermaga Subur	1	Unit	✓			
6	Komputer PC/Laptop	15	Unit	✓	✓	✓	

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dishub Kab.Boven Digoel

2) Prasarana

Prasarana yang telah dibangun sampai saat ini sebagai berikut :

Tabel 2.3

Prarana Terminal

No.	Nama Terminal	KM	Type	Luas (M ²)	Ket.
1.	Terminal Tanah Merah	± 3	C	150.000	Operasional
2.	Terminal Asiki	± 90	C	60.710	Belum operasional
3.	Terminal Mumanjako	± 3	C	-	Rusak Berat/Tidak Operasional

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishub Kab.Boven Digoel

Tabel 2.4

Prarana Pelabuhan/Dermaga

No.	Nama Pelabuhan/Dermaga	Konstruksi Dermaga	Ukuran	Ket.
1.	Pelabuhan Tanah Merah	Beton	30 m x 8 m	Operasional
2.	Pelabuhan Ikisi	Semi Permanen	23 m x 5,6 m	Operasional
3.	Pelabuhan Asiki	Belum ada dermaga	-	Operasional
4.	Pelabuhan Getentiri	Kayu	3 m x 10 m	Operasional
5.	Dermaga Rakyat Subur	Beton	8 m x 11	Operasional
6.	Dermaga Rakyat Miri	Beton	3 m x 10 m	Tidak Operasional
7.	Dermaga Rakyat Asiki	Beton	3 m x 10 m	Operasional
8.	Dermaga Rakyat Kouh	Beton	3 m x 10 m	Tiddak Operasional

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishub Kab.Boven Digoel

3) Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah terpasang seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan (PJU) Solar Cell, delineator, pagar pengaman jalan, seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan

No	Nama Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rambu Lalu Lintas	50 Unit	✓	✓	✓	
2	Lampu Penerangan Jalan (PJU) Solar Cell	213 Unit	✓	✓	✓	Sebagian besar tidak menyala
3	Delineator	30 unit	-	✓	-	

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishub Kab.Boven Digoel

4) Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jasa Pelayanan Umum yang diselenggarakan juga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), namun sejak tahun 2020 dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa hanya Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang telah disertifikasi yang bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 2.6.
Fasilitas Pelayanan PKB

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gedung Pelayanan Administrasi	1	Unit	-	✓	-

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kab.Boven Digoel

5) Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Boven Digoel mencakup perizinan dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun tanpa target PAD atau hanya untuk pengawasan dan pengendalian saja. Pelayanan Perizinan yang selama ini sudah dilakukan secara terpadu di Dinas

Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah :
Pembuatan/Perpanjangan Kartu Pengawasan/Perpanjangan Izin
Trayek, Rekomendasi untuk kendaraan plat kuning.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 (lima) tahun melaksanakan 11 program dan berdasarkan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020 telah menetapkan indikator kinerja pelayanan seperti pada tabel dengan melaksanakan 7 (tujuh) program prioritas yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


Pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel

NO	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-2016-2020					Realisasi Capaian Tahun Ke-2016-2020					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-2016-2020				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana/infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara yang baik dan berkualitas.				1	3	3	3	3	0	2	2	1	0	0	67	67	33	0
2	Terbangunnya sarana/prasarana dan fasilitas transportasi darat, sungai dan udara yang memadai;				8	7	9	7	2	5	4	4	0	1	63	57	44	0	50
3	Tersedianya angkutan darat, sungai dan udara yang memadai.				11	14	13	9	4	6	14	13	9	4	55	100	100	100	100
4	Terlaksananya sosialisasi, temu wicara penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman dan selamat				0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	-	100	-	100	100
5	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan umum				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
6	Terlaksananya Forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan				3	3	3	3	3	3	0	3	0	0	100	-	100	-	-
7	Terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur melalui Pendidikan Formal S1, Diklat PIM dan Diklat Teknis				6	4	7	9	4	4	4	3	1	0	67	100	43	11	-

Dari table tersebut diatas dapat terlihat bahwa beberapa indikator kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun tidak bisa dicapai dengan baik, seperti pada penyediaan dokumen perencanaan prasarana transportasi baik darat, sungai dan udara dan pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas transportasi, namun pada beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan seperti penyediaan alat angkutan baik udara, perairan (sungai) dapat tercapai dengan baik.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam khususnya dalam penyediaan dokumen perencanaan transportasi yang baik dan berkualitas khususnya pada tahun ke-4 dan ke-5 sangat rendah karena keterbatasan alokasi APBD untuk Dinas Perhubungan;



Untuk indikator kinerja pelayanan dalam rangka penyediaan alat angkutan baik darat dan perairan (sungai) selama 5 (lima) tahun secara umum mencapai target karena adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Perdesaan dan

Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Beberapa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan lainnya yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan sungai, secara umum juga berjalan maksimal karena sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan yang harus menjadi prioritas untuk menjamin keberlangsung lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman dan selamat.

Untuk pengembangan SDM baik melalui jalur pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan jabatan maupun teknis selama kurun waktu 5 (lima) tahun berlangsung dengan maksimal sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan telah dialokasikan.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-2015-2020					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-2016-2020					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-2016-2020					Rasio Ref. Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	3.674.424.002	3.642.073.863	3.144.780.964	3.090.025.093	3.982.163.004	3.674.424.002	3.542.673.953	3.144.780.964	3.200.035.093	4.160.221.062	100	100	100	94	96	61.547,512	97.159,412
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.625.087.100	1.481.064.700	1.636.591.000	2.151.793.664	2.338.036.898	1.681.857.600	1.325.231.700	1.707.935.000	1.998.207.479	1.189.713.908	98	91	97	108	107	142.889,881,6	92.428.738,4
Program Peningkatan Sistem dan Prasarana Aparatur	221.615.000	351.490.000	643.085.000	439.426.147	301.114.318	373.866.500	141.336.500	592.885.000	375.626.872	83.356.959	80	107	108	76	361	15.899,903,6	38501806,2
Program Peningkatan Diapital Aparatur	49.150.000	26.000.000	98.200.000	149.247.100	0	81.830.000	28.700.000	98.200.000	149.247.100	0	60	98	100	100	0	-9.830,000	-16.330,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	632.200.000	370.809.000	736.844.000	706.540.000	398.396.000	79.800.000	399.058.000	850.700.000	784.100.000	0	968	95	89	98	0	29.030,000	-15.960,000
Program Peningkatan Penguatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.335.000	6.025.000	8.220.000	8.675.000	6.750.000	9.335.000	6.025.000	8.220.000	8.675.000	6.750.000	100	100	100	100	100	-521,000	-521,000
Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	385.420.000	372.309.000	1.232.873.000	1.200.260.000	84.706.000	832.460.000	361.800.000	1.381.287.000	1.090.460.000	32.400.000	46	103	79	110	102	-60.144.000	-156.012,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	369.085.000	90.230.000	310.500.000	245.674.400	130.810.000	389.085.000	90.230.000	2.795.095.000	259.000.000	282.840.000	95	100	13	95	49	-45.849,000	-21.249,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.229.695.000	3.983.295.000	3.827.933.000	3.183.124.300	2.167.360.000	1.142.704.000	3.924.115.000	3.820.285.000	3.183.124.300	1.910.370.000	108	102	100	100	113	191.591,000	189.833.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Lintas Perhubungan	4.669.980.000	7.148.510.000	5.461.290.000	2.084.000.000	553.400.000	4.585.980.000	8.168.240.000	7.111.200.000	2.081.300.000	1.533.992.000	102	88	77	100	36	-823.316,000	-606.397,000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lintas Perhubungan	590.017.000	81.645.000	58.850.000	73.110.000	0	448.326.000	0	38.850.000	73.110.000	0	132	0	100	100	0	-118.003,400	-89.665,200
Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor	89.900.000	87.800.000	77.100.000	66.340.000	58.600.000	83.900.000	126.400.000	77.100.000	66.340.000	38.600.000	100	70	100	100	100	-5.060,000	-3.060,000

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan umumnya berjalan dengan baik namun pada beberapa program terlihat bahwa beberapa pelaksanaan anggaran kurang baik, sehubungan dengan adanya kondisi-kondisi yang sulit diprediksi yang mengakibatkan pelaksanaan suatu program harus mengalami perubahan karena kebutuhan mendesak disamping kendala kemampuan Sumber Daya Manusia serta manajemen pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran.

Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis dibidang transportasi, baik transportasi darat, transportasi perairan (sungai) maupun transportasi udara yang merupakan urat nadi atau penggerak pertumbuhan ekonomi masih mengalami banyak tantangan

khususnya dalam pendanaan, dimana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat alokasi APBD untuk sector perhubungan untuk pelaksanaan program pelayanan dibidang perhubungan sangat minim dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diharapkan. Dari table tergambar bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran ddan realisasi sebagian besar bernilai negative (-).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanannya berpedoman pada aturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian Perhubungan dan aturan lainnya, sehingga dalam pengembangan pelayanan menghadapi berbagai tantangan dan peluang.

Tantangan Pelayanan Dinas Perhubungan yang dihadapi sebagai berikut :

- 1) Kondisi geografis maupun kondisi topografi wilayah Kabupaten Boven Digoel yang sangat luas serta dilintasi oleh banyaknya aliran sungai yang berkelok-kelok;
- 2) Penyebaran penduduk pada 20 wilayah distrik dan 112 kampung yang umumnya masih terisolir dan sulit di jangkau dengan transportasi darat;
- 3) Belum tersediannya angkutan umum reguler baik angkutan darat, perairan (sungai) dan udara secara tetap dengan tarif ekonomis dan terjangkau;
- 4) Kemampuan daya dukung prasarana jalan sangat rendah mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan yang berdampak pada tariff angkutan jalan khususnya ke wilayah distrik dan kampung-kampung;
- 5) Belum adanya jaringan trayek yang terstruktur, teratur dan terpadu mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum optimal dan efisien;
- 6) Belum maksimalnya prasarana terminal, pelabuhan, lapangan terbang dalam memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat;
- 7) Belum tersedianya lahan bagi angkutan lintas antar kabupaten untuk menjadi tempat naik dan turunnya penumpang;
- 8) Belum terbangunnya prasaran gedung pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas lainnya sehingga tidak dilaksanakan

- pemeriksaan kondisi laik jalan bagi kendaraan wajib uji yang berdampak pada keselamatan berkendara;
- 9) Belum optimalnya lapangan terbang Yaniruma dan Wanggemalo dalam mendukung keselamatan penerbangan khususnya panjang run way dan konstruksi landasan pacu;
 - 10) Belum terbangunnya pelabuhan Asiki yang representative dalam melayani kapal-kapal tonase besar untuk mendukung program tol laut;
 - 11) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara signifikan khususnya dalam kota Tanah Merah baik roda 2 (dua), roda 4 (empat), roda 6 (enam) yang akan membawa dampak pada aktivitas lalu lintas kendaraan dan percepatan polusi udara akibat asap kendaraan bermotor;
 - 12) Minimnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya rambu-rambu, APIL serta belum optimalnya lampu penerangan jalan umum (pju) solar cell yang berdampak pada keselamatan lalu lintas;
 - 13) Tuntutan ganti rugi tanah untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi serta belum tersertifikasinya tanah pemerintah yang diperuntukkan untuk pembangunan prasarana transportasi;
 - 14) Keterbatasan pendanaan dari APBD untuk pembangunan prasaran dan fasilitas transportasi;
 - 15) Keberadaan dan kompetensi SDM yang masih relatif terbatas menjadi salah satu tantangan yang harus menjadi perhatian. Dengan meningkatnya dan pengoptimalisasian peran bidang perhubungan dalam penataan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga membutuhkan penambahan SDM, dan juga peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta studi tiru (kunjungan kerja) ke daerah lain untuk belajar dari keberhasilan yang telah diraih oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel yaitu :

- 1) Dukungan kebijakan seperti undang-undang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua;
- 2) Kebijakan RTRW Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Boven Digoel serta Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang didalamnya beberapa program strategis bidang transportasi direncanakan di wilayah kabupaten Boven Digoel seperti pelabuhan, bandara udara;
- 3) Dukungan terbentuknya DOB yaitu Provinsi Papua Selatan;
- 4) Dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan baik perhubungan udara melalui program subsidi angkutan udara perintis baik orang maupun barang/cargo dan perhubungan darat melalui subsidi angkutan jalan perintis (DAMRI) dan perhubungan laut melalui program tol laut dan subsidi angkutan laut perintis ;
- 5) Dukungan pembiayaan melalui DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan (Kementerian Perhubungan) dan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi);
- 6) Dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Papua khususnya bidang perhubungan laut dalam pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan;
- 7) Keberadaan jaringan transportasi berskala nasional sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Boven Digoel;
- 8) Posisi strategis wilayah Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan PNG dan beberapa kabupaten di wilayah Papua Pegunungan Tengah;
- 9) Bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel yang konsekuensinya presentase angkutan umum perlu peningkatan yang ditunjang pula dengan kualitas angkutan umum tersebut;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Boven Digoel yang sangat luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata di 20 distrik dan 112 kampung, menuntut pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, terjangkau dan dalam satu kesatuan konektivitas jaringan transportasi daerah, wilayah dan nasional.

Hubungan konektivitas baik ke luar wilayah kabupaten maupun dalam wilayah kabupaten Boven Digoel seperti dari ibu kota kabupaten ke distrik-distrik maupun antar distrik dan/ atau antar kampung sampai saat ini sebagian besar belum dapat dilayani oleh transportasi jalan, padahal jaringan transportasi jalan yang baik dapat mendorong mobilitas angkutan orang dan barang.

Pembangunan dan pembukaan jalan belum maksimal mendorong percepatan mobilitas orang dan barang, karena kondisi jalan yang belum maksimal dan masih sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan curah hujan sehingga belum ada pihak swasta yang menyediakan angkutan umum dengan tarif reguler yang murah dan terjangkau masyarakat sehingga tarifnya masih berdasarkan kesepakatan antar penyediaan jasa angkutan jalan dengan pengguna jasa, kecuali distrik dan kampung-kampung berada di sepanjang jalan Nasional Trans Papua. Untuk daerah-daerah yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi sungai dipandang sangat tidak efektif dan efisien karena waktu tempuh yang lama dan biaya yang sangat mahal serta belum tersedia angkutan sungai reguler dengan tariff dan jadwal keberangkatan yang sudah terjadwal, sehingga umumnya masih bersifat kesepakatan /carter.

Untuk distrik yang telah tersedia bandara dan lapangan terbang, transportasi udara menjadi solusi yang baik untuk mewujudkan konektivitas serta sangat membantu masyarakat dengan adanya

angkutan subsidi perintis udara orang dan barang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI seperti bandara Tanah Merah, Mindiptana, Bomakia, Manggelum, Koroway Batu dan lapangan terbang Yaniruma dan Wanggemalo;

Pada bidang transportasi perairan khususnya transportasi laut untuk logistik dari luar kabupaten Boven Diogel masih sangat terkendala pada prasarana dan fasilitas pelabuhan yang belum representative sehingga belum maksimal untuk mendukung program tol laut yang diharapkan dapat menurunkan disparitas harga di wilayah Kabupaten Boven Digoel dan sekitarnya.


Pengelolaan transportasi di kabupaten Boven Digoel sangat membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, pembiayaan dan regulasi dan atau kebijakan pememrintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum mengingat transportasi merupakan urat nadi untuk mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui ketersediaan sarana/prasarana dan fasiita stransportasi yang efektif, efisien, aman dan terjangkau masyarkat.

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1. Belum efektifnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya penetapan rencana induk jaringan LLAJ 2. Belum efektifnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan 3. Belum efektifnya pengelolaan terminal penumpang tipe C 4. Belum efektifnya pengujian berkala kendaraan bermotor 5. Belum efektifnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 6. Belum efektifnya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah 7. Belum efektifnya penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. Visi



Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dan berdayasaing
2. Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan
4. Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat
5. Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat

Dengan melihat identifikasi permasalahan dibidang urusan perhubungan yang dituangkan dalam RPJMD pada Tabel 4.15 bahwa akar masalah pelayanan Dinas Perhubungan adalah belum efektifnya penetapan rencana induk jaringan LLAJ, belum efektifnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan, belum efektifnya pengelolaan terminal penumpang tipe C, belum efektifnya pengujian berkala kendaraan bermotor, belum efektifnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, belum efektifnya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah dan belum efektifnya penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah.

Hal tersebut menjadi pemasalahan karena minimnya perhatian dalam penyusunan perencanaan dan regulasi yang menjadi prasyarat dasar berlangsungnya suatu system transportasi yang baik, teratur, tertib dan sistimatis dalam mewujudkan suatu konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk mobilisasi orang dan/ atau barang.

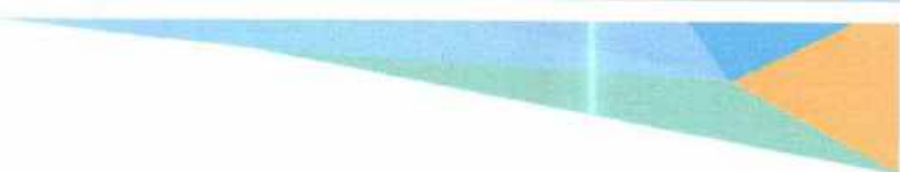
Sistem transportasi di wilayah Kabupaten Boven Digoel perlu mendapatkan perhatian serius mengingat kondisi jaringan jalan yang belum optimal dan serta sangat dipengaruhi kondisi cuaca/curah hujan, sehingga moda transportasi alternatif seperti moda perairan dan moda udara menjadi menjadi pilihan yang juga perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan selain urusan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat beberapa kegiatan strategis Kementerian Perhubungan RI yang dapat memberik dampak pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Boven Diogel khususnya dan Provisni Papua pada umumnya baik transportasi darat, laut dan udara.

Pada bidang transportasi darat beberapa kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Perhubungan seperti Subsidi Angkutan Perintis Jalan melalui operasional DAMRI trayek Merauke-Tanah Merah, beberapa trayek lainnya serta pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Nasional Trans Papua secara tidak langsung menjadi factor-faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pada bidang transportasi udara juga sangat signifikan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas orang dan/ atau barang pada beberapa wilayah terpencil seperti pada di distrik Yaniruma, distrik Manggelum, distrik Bomakia, distrik Mindiptana, distrik Kombay dan Tanah Merah ibu kota kabupaten, melalui program subsidi angkutan



perintis udara baik angkutan orang maupun angkutan barang/cargo.

Pada bidang transportasi perairan baik laut dan sungai, juga memiliki peluang yang sangat besar dalam mendorong konektivitas dan aksesibilitas seperti program tol laut dan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana pelabuhan. Untuk program tol laut dinilai belum maksimal berdampak pada penurunan disparitas harga barang di wilayah kabupaten Boven Digoel karena terkendala kesiapan prasarana pelabuhan yang memadai serta alur pelayaran pada sungai Digoel yang sangat dipengaruhi pasang surut oleh curah hujan. Untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana pelabuhan salah satu factor penghambat adalah kesiapan dokumen perencanaan serta status lahan yang belum diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera membangun pelabuhan yang representative melayani kapal-kapal dengan tonase yang besar.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah:

1. Kondisi geografis dan topografi dari wilayah Kabupaten Boven Digoel yang sangat luas dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk melaksanakan pelayanan di bidang transportasi;
2. Alokasi anggaran pemerintah daerah dalam bidang transportasi masih sangat rendah dibanding dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat baik sarana, prasarana dan fasilitas transportasi untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas;
3. Sumber daya baik SDM, regulasi dan pembiayaan serta komunikasi dan koordinasi yang belum maksimal dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)


Karakteristik topografi wilayah Kabupaten Boven Digoel yang sangat luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap distrik dan kampung-kampung yang sebagian besar masih sulit dijangkau dengan transportasi yang efektif dan efisien sehingga penataan ruang perlu melalui suatu kajian yang komprehensif. Kondisi ini sangat berpengaruh pada pelayanan Dinas Perhubungan.

Beberapa faktor pendorong dari telaahan tata ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel adalah telah ditetapkan lokasi-lokasi prioritas untuk pembangunan sarana/prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal sehingga dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dalam pelaksanaan pembangunan baik pelabuhan, bandara, dermaga penyeberangan, terminal dan fasilitas lainnya Dinas Perhubungan perlu memperhatikan fungsi ruang dan lokasi penetapan pengembangan wilayah, dalam mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan demikian Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan prasarana transportasi perlu membuat suatu kajian lingkungan dan studi kelayakan dan pemilihan lokasi pada wilayah yang telah menjadi arahan pada RTRW Kabupaten, namun tidak dipungkiri bahwa sering terjadi pembangunan dilakukan dengan melihat kondisi eksisting yang ada sebagai suatu kebutuhan masyarakat.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Papua, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dibidangn Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 antara lain :

1. Belum efektifnya penetapan rencana induk jaringan LLAJ
2. Belum efektifnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan
3. Belum efektifnya pengelolaan terminal penumpang tipe C
4. Belum efektifnya pengujian berkala kendaraan bermotor
5. Belum efektifnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
6. Belum efektifnya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah
7. Belum efektifnya penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah

Selain isu strategis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjadi prioritas Bupati-Wakil Bupati selama kepemimpinan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025, beberapa isu strategis dibidang pengelolaan pelayaran dan pengelolaan penerbangan yang juga menjadi isu strategis antara lain :

- 1) Belum efektifnya perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai yang masih menjadi sarana transportasi utama dalam menghubungkan beberapa wilayah-wilayah di Kabupaten Boven Digol;
- 2) Belum efektifnya pengelolaan beberapa pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung program tol laut, jalur logistic serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Belum adanya dokumen perencanaan memadai yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan/dermaga khususnya untuk beberapa pelabuhan/dermaga sungai dan penyeberangan

yang terdapat dapan RTRW dan TATRALOK Kabupaten Boven Digoel yang diusulkan untuk dibangun;

- 4) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian angkutan subsidi udara perintis penumpang dan cargo serta BBM;
- 5) Belum efektifnya 2 (dua) lapang terbang yang masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Boven Digoel dalam melayani lalu lintas dan angkutan udara;
- 6) Belum adanya regulasi dalam pemberian izin operasi, pengawasan, pengendalian bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan”

Misi :

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dan berdayasaing**
2. **Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif**
3. **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan**
4. **Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat**
5. **Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat**

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 20212 – 20256, yaitu :

Misi ke-3 : **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan.**

Pelayanan Dinas Perhubungan yang terkait dengan Misi Ketiga ini tertuang dalam Tujuan ke-1 (T-1) yaitu Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata dengan dan Sasaran ke-5 (S-5) yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Perhubungan

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel periode tahun 2021-2025 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas transportasi untuk mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD DINAS PERHUBUNGAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di atas, maka sasaran jangka menengah dari Dinas Perhubungan Tahun 2021-2025 disusun sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas transportasi untuk mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas transportasi untuk mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan transportasi yang akurat dan memadai;	Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi darat yang disusun	1 dok	2 dok	3 dok	5 dok	7 dok
			Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi sungai yang disusun	1 dok	1 dok	3 dok	4 dok	5 dok
			Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi udara yang disusun	N/A	N/A	1 dok	2 dok	3 dok
		Meningkatnya kuantitas sarana/moda angkutan darat dan sungai	Jumlah sarana/moda angkutan darat yang disediakan	40 unit	43 unit	46 unit	50 unit	60 unit
			Jumlah sarana/moda perairan yang disediakan	40 unit	50 unit	60 unit	70 unit	80 unit
		Meningkatnya kuantitas prasarana pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah terminal yang dibangun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
			Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang dibangun	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit
			Jumlah halte yang dibangun	N/A	N/A	1 unit	2 unit	3 unit
			Jumlah pos pengawasan LLAJ yang dibangun	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
		Meningkatnya fasilitas perlongkapan jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang	50 unit	50 unit	70 unit	80 unit	100 unit
			Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)/Traffic Light yang dipasang	N/A	N/A	N/A	2 unit	3 unit
			Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dipasang	213 unit	313 unit	400 unit	420 unit	450 unit

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor	Persentase alat uji kendaraan (Uji KIR) yang disediakan	N/A	N/A	N/A	50%	100%
		Meningkatnya kuantitas prasarana transportasi perairan (laut/sungai)	Jumlah pelabuhan/dermaga beton yang dibangun	5 unit	5 unit	5 unit	6 unit	6 unit
		Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan transportasi darat	Jumlah jenis fasilitas pelabuhan/dermaga yang diadakan	N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit
		Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan transportasi darat	Jumlah terminal yang ditingkatkan dan direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan pelabuhan/dermaga	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang direhabilitasi	N/A	N/A	50 unit	70 unit	80 unit
		Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan lapangan terbang	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang direhabilitasi	50 unit	80 unit	150 unit	200 unit	250 unit
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Jumlah pelabuhan/ dermaga yang ditingkatkan dan direhabilitasi	N/A	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Persentase lapangan terbang yang ditingkatkan dan direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	Persentase jumlah distrik yang bisa diakses dengan transportasi darat, sungai dan udara	95%	95%	95%	95%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	Prosesante trayek angkutan kota yang terlayani angkutan umum	10%	10%	12%	13%	15%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	Prosesante trayek angkutan pedesaan yang terlayani angkutan umum	20%	23%	25%	30%	35%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati yang disusun	1 dok	1 dok	2 dok	3 dok	3 dok
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan serta pengelolaan	-N/A	N/A	2 dok	3 dok	4 dok

No	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)
(1)		pelayaran dan penerbangan	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan pelayaran yang disusun	N/A	N/A	1 dok	2 dok	3 dok
			Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan penerbangan yang disusun	N/A	N/A	N/A	1 dok	2 dok
			Persentase jumlah kampung yang bisa diakses dengan transportasi darat, sungai dan udara	65%	67%	68%	70%	75%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan angkutan umum yang diuji	N/A	N/A	N/A	30%	50%
		Meningkatnya jumlah pelabuhan/dermaga yang dioperasikan	Persentase pelabuhan yang beroperasi dengan baik	45%	50%	60%	70%	80%
		Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sector perhubungan	Kontribusi PAD Sektor Perhubungan terhadap PAD Kabupaten Boven Digoel	0,5%	0,6%	1%	1,2%	1,5%
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder penyelenggara dan pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah forum koordinasi penyelenggaran, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan	N/A	N/A	2 kali	3 kali	4 kali
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan UPBU dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Persentase frekuensi penerbangan perintis penumpang yang beroperasi	80%	90%	100%	100%	100%
			Persentase penerbangan perintis barang yang beroperasi	80%	90%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Bupati Boven Digoel terpilih 5 (lima) tahun ke depan yakni “Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan” khususnya Misi ke-3 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan, Tujuan ke- 1(T1): Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata dan Sasaran ke-5 (S5) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Perhubungan.

Tabel Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2025

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan			
MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan dan transportasi yang akurat dan memadai;	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan dan transportasi yang akurat dan memadai;	Meningkatkan perencanaan dan pembangunan prasarana transportasi dengan baik dan berkelanjutan	Menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Menyusun dokumen perencanaan pengelolaan pelayaran Menyusun dokumen perencanaan pengelolaan penerbangan
		Menggalang dan memanfaatkan dukungan Instansi-Instansi Terkait guna mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan	Membangun komunikasi, koordinasi/konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Provinsi dan BP4D Kabupaten, BPKAD dan Komisi C DPRD untuk mendapatkan dukungan kebijakan anggaran
2. Meningkatkan jumlah sarana/moda darat dan perairan/sungai	2. Meningkatkan jumlah sarana/moda darat dan perairan/sungai	Meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang beroperasi baik moda darat maupun moda perairan/sungai sesuai dengan trayek/lintasan yang ditetapkan dan/atau tersedia	Menyediakan dan memberikan bantuan saran/moda darat dan moda perairan bagi badan usaha yang bersedia beroperasi melayani trayek/lintasan yang ditetapkan dan/ atau tersedia Mendorong pihak swasta dan/ atau penyedia jasa angkutan umum untuk melayani trayek/lintasan yang ditetapkan dan/atau tersedia
			Membangun hubungan kerjasama dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXV Papua dan Papua Barat serta PT. DAMRI Cabang Merauke

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan jumlah prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan jumlah prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan pembangunan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Membangun prasarana terminal, pos pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, halte
Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan	fasilitas	Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan nasional, provinsi dan kabupaten	Membangun prasarana dan fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor (uji KIR)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor yang standar	kuantitas dan kualitas fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor yang standar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor yang standar	Menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor Membangun komunikasi serta hubungan kerjasama dengan pihak BPTD Wilayah XXV Membangun komunikasi, koordinasi dengan TAPD, Komisi C untuk percepatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk keselamatan lalu lintas serta pendapatan asli daerah dari Retribusi Uji KIR
Meningkatnya kuantitas pengelolaan pelayaran	kuantitas pengelolaan	Meningkatkan ketersediaan prasarana pelabuhan/ dermaga	Menyusun dokumen perencanaan untuk pelabuhan/ dermaga yang direncanakan Melanjutkan penyusunan dokumen perencanaan untuk pelabuhan/dermaga existing Melanjutkan tahapan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan, FS, hasil kajian, hasil studi studi untuk pelabuhan Asiki dan Pelabuhan Mandobo Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bade dan Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan pelabuhan/dermaga</p> <p>Meningkatnya kualitas fasilitas dan perlengkapan lapangan terbang</p>	<p>Meningkatkan fungsi fasilitas perlekngkapan jalan untuk keselamatan jalan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan fungsi fasilitas pelabuhan</p> <p>Meningkatkan pelayanan standar keselamatan penerbangan</p> <p>Meningkatkan angkutan jalan, sungai dan udara</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dukungan percepatan pembangunan pelabuhan/dermaga yang prioritas</p> <p>Membangun pelabuhan/dermaga</p> <p>Melakukan rehabilitasi/perawatan rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum</p> <p>Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga, mengamankan rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum</p> <p>Mengupayakan pendanaan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Transportasi Perairan</p> <p>Melakukan rehabilitasi/perawatan dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan jalan lingkungan serta penerangan kawasan pelabuhan</p> <p>Melakukan perpanjangan landasan pacu lapangan terbang</p> <p>Menyediakan fasilitas keselamatan penerbangan pada lapangan terbang</p> <p>Melakukan rehabilitasi/perawatan lapangan terbang</p> <p>Mengupayakan penyediaan layanan angkutan jalan, sungai dan udara</p> <p>Mendorong penyediaan subsidi angkutan jalan bagi penyedia jasa angkutan yang berbadan hukum untuk melayani ke setiap distrik dan kampung yang telah tersedia jalan yang memadai</p> <p>Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada para pengusaha/ penyedia jasa transportasi untuk melayani rute/trayek yang telah tersedia</p> <p>Membangun komunikasi/koordinasi serta hubungan kerjasama dengan UPBU dan Ditjen Perhubungan Udara untuk penyediaan subsidi angkutan udara perintis penumpang dan barang serta Balai Pengelola Transportasi Darat (UPTD) Wilayah XXV untuk penyediaan subsidi angkutan jalan perintis penumpang dan barang.</p>
<p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan</p>	<p>Meningkatnya jangkauan pelayanan transportasi</p>	<p>Meningkatkan pelayanan angkutan jalan, sungai dan udara</p>	<p>Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada para pengusaha/ penyedia jasa transportasi untuk melayani rute/trayek yang telah tersedia</p> <p>Membangun komunikasi/koordinasi serta hubungan kerjasama dengan UPBU dan Ditjen Perhubungan Udara untuk penyediaan subsidi angkutan udara perintis penumpang dan barang serta Balai Pengelola Transportasi Darat (UPTD) Wilayah XXV untuk penyediaan subsidi angkutan jalan perintis penumpang dan barang.</p>

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan	Meningkatkan pelayanan angkutan perdesaan	Menyusun jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek angkutan perdesaan Mendorong partisipasi penyedia jasa angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan untuk memberikan jasa pelayanan yang baik kepada masyarakat
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pelayaran dan penerbangan	Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan SDM penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran dan penerbangan	Menertibkan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dan angkutan perdesaan. Memberikan reward dan penghargaan kepada penyedia jasa angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang memiliki kinerja pelayanan jasa angkutan yang baik Memberi kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dari tingkat SMA ke Sarjana (S1) Membangun komunikasi/koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Memberikan diklat teknis kepada Aparatur penyelenggara LLAJ, pengelola pelayaran dan pengelola penerbangan Memberika kesempatan kepada Aparatur untuk melakukan studi tiru pada instansi penyelenggara LLAJ, Pengelola Pelayara.
		Meningkatkan ketersediaan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran dan penerbangan	Menyediakan bahan bacaan tentang peraturan penyelenggaraan LLAJ, Menyusun dokumen regulasi, standar operasional prosedur dan standard pelayanan minimal (SPM) Perhubungan

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Arah Kebijakan Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan LLAJ, pengelolaan Pelayaran dan Penerbangan
Meningkatnya pelayanan pelayanan kendaraan bermotor	kuualitas pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai standard Melakukan indentifikasi dan pengumpulan data kendaraan wajib uji Menyediakan tenaga penguji sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan Meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan registrasi kendaraan wajib uji dan melakukan uji kendaraan bermotor secara berkala Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan kendaraan wajib uji
Meningkatnya pelabuhan/dermaga dioperasikan	jumlah yang dioperasikan	Meningkatkan fasilitas pendukung kerja aparatur pada pelabuhan eksisting Menempatkan aparatur pengelola pelabuhan Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pelabuhan
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sector perhubungan		Mengoptimalkan pengoperasian terminal dan pelabuhan yang sudah dibangun Menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi, berintegritas dan bertanggung jawab Mendorong pengguna jasa terminal, pelabuhan untuk melakukan aktivitas di kawasan terminal dan pelabuhan sesuai standar operasional

VISI: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

MISI 3: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengelolaan perparkiran	Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan perparkiran di tepi jalan
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder penyelenggara dan pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran dan penerbangan	Mendorong percepatan pembangunan dan gedung pengoperasian pengujian kendaraan bermotor	<p>Bekerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan jasa parkir untuk pemilik usaha</p> <p>Membangun komunikasi/koordinasi dengan pihak pengambil kebijakan untuk mendapatkan dukungan anggaran pembangunan gedung pengujian</p> <p>Membangun sinergitas dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV untuk penyediaan peralatan dan fasilitas pengujian</p> <p>Mempersipakan dan melengkapi persyaratan sertifikasi Unit Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor</p>
		Mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder penyelenggara dan pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran dan penerbangan	Membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian, PU, akademisi dan lembaga swadaya dan pemerhati penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan
			Melaksanakan forum-forum koordinasi untuk pelaksanaan pengawasan, pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran dan penerbangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten Kota
7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Pelayaran

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha
4. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
6. Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
8. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR / DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
9. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
10. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
11. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
12. Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
13. Kegiatan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
14. Kegiatan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

15. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

IV. Program Pengelolaan Penerbangan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 yang mengacu pada target RPJMD Kabupaten Boven Digoel pada periode 2021-2025, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Kode	Isian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021			2022			2023			2024						2025		
				K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%				K	Rp.	%
	TOPIK: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAP	Kategori																		
2.15.01.2.01	Program Peningkatan Akses Penerimaan Dana Desa Kabupaten/ Kota	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.01.01	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.01.02	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.01.03	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.01.04	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.01.05	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pelayanan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.02.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.15.01.2.03.01	Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Kode	Asas/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	2021			2022			2023			2024			2025			Lohat	Sumber Dana	Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2.15.01.2.03.02	Programme Bina Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Bina Milik Daerah, pada SKPD	dokumen	0,00	0,00	1,00	150.000.000	2,00	100.000.000	3,00	50.000.000	3,00	300.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bina Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Bina Milik Daerah, pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	1,00	25.000.000	2,00	25.000.000	3,00	25.000.000	3,00	75.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.03.05	Belanja dan Penyelenggaraan Bina Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Keseluruhan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Bina Milik Daerah, pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	2,00	2.000.000	3,00	2.000.000	4,00	2.000.000	4,00	7.500.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.03.06	Penyediaan dan Penyelenggaraan Bina Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Bina Milik Daerah, pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.04	Administrasi Pengawasan Daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap PD	Persen	0%	20%	20%	40.000.000	30%	333.000.000	35%	105.000.000	33%	564.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Struktur Birokrasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Struktur Birokrasi dan Kebijakan Struktur Birokrasi Daerah	dokumen	0,00	1,00	2,00	48.000.000	3,00	350.000.000	4,00	-	4,00	449.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.04.03	Penyediaan dan Penyelenggaraan Struktur Birokrasi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan dan Penyelenggaraan Kebijakan Struktur Birokrasi Daerah	Laporan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengawasan Birokrasi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengembangan Birokrasi Daerah	dokumen	0,00	0,00	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	15.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.3.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi dan kinerja pelayanan aparatur PD	Persen	-	251.861.000	-	-	632.500.000	577.500.000	-	577.500.000	-	2.034.361.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sistem dan Prasarana Daerah Pegawai	Jumlah Unit Pelengkapan Sistem dan Prasarana Duplikat Pegawai	unit	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keorganisasian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Keorganisasian	paket	-	99.913.000	-	-	150.000.000	50.000.000	-	-	-	349.913.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	7.500.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.3.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berasas: Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4,00	4,00	6,00	280.000.000	8,00	250.000.000	10,00	250.000.000	10,00	750.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.05.11	Timbangan Telah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Telah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5,00	10,00	15,00	151.948.000	20,00	250.000.000	25,00	250.000.000	25,00	901.948.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan PD	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Kesenjangan Fasilitas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6.624.400	9.516.700	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	61.141.100	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Perbaikan dan Pengembangan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Pengembangan Kantor yang Disediakan	paket	7.836.000	88.587.000	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	396.423.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Perbaikan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tinggal yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	100.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	39.181.400	110.253.900	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	749.635.300	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	paket	19.375.000	16.150.000	-	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	95.525.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perangkat Elektronik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perawatan Perangkat Elektronik yang Disediakan	dokumen	3.600.000	3.600.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	22.200.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Komunikasi Tera	Jumlah Laporan Pelaporan Kegiatan Komunikasi	Laporan	54.000.000	37.200.000	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	241.200.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.09	Penyediaan Paket Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Laporan	369.600.000	617.532.000	-	-	650.000.000	700.000.000	-	-	-	3.037.132.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan					

Kode	Agenda/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RESTRUK-PD	Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021			2022			2023			2024						2025		
					K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.				K	Rp.	Rp.
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Barang MILK Daerah Peningkat Urusan/Perencanaan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur PD	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Asest Tsk Berwujud	Jumlah Unit Asest Tsk Berwujud yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.08	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan PD	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.08.01	Penyelenggaraan Jasa Surtal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surtal	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.08.02	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Digelakkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.08.03	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Kantor yang Digelakkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09	Pembelian Barang MILK Daerah	Persentase jumlah barang MILK Daerah yang dipelabaris	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.01	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas dan Kendaraan Dinas lainnya yang dipelabaris	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.02	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelabaris dan Perawatan dan Perbaikan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.03	Pembelian Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.04	Pembelian Perbaikan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.10	Pembelian/Perbaikan Barisan dan Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barisan dan Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Digelakkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.05	Tujuan : Meningkatkan Absesibilitas dan Mobilitas Perhubungan	Tingkat Absesibilitas dan Mobilitas	Nilai	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,23	0,26	0,23	0,26	0,23	0,26	0,23	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.09.06	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Layanan	Persentase absesibilitas dan mobilitas ke setiap wilayah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DAU	Dinas Perhubungan				
2.15.02	Pengadaan Barang MILK Daerah Peningkat Urusan/Perencanaan Daerah	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km per kendaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	Dinas Perhubungan				
		Persentase rambu rambu LLA yang terpasang dan berfungsi baik	persen	N/A	70,00	568.954.795	80,00	571.545.536	85,99	592.697.285	90,00	588.339.353	90,00	585.710.478	90,00	585.710.478	DAU	Dinas Perhubungan				
		Rasio unit trotoar	per penduduk	N/A	N/A	924.541.095	0,00	432.817.108	0,00	437.015.465	0,01	441.254.515	0,01	2.164.287.359	0,01	2.164.287.359	DAU	Dinas Perhubungan				
		Jumlah terminal angkutan darat yang berfungsi dalam kondisi baik	unit	N/A	N/A	428.659.145	N/A	432.817.108	N/A	437.015.465	N/A	441.254.515	N/A	2.164.287.359	N/A	2.164.287.359	DAU	Dinas Perhubungan				

Kode	Apenda/ Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja Pada Akhir Periode RENCANA-PD	Sumber Dana	Unit Kerja Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan penyelenggaraan LLAJ yang disahkan	orang	2040.000	3000,00	283.027.397	3406,00	283.772.763	3873,00	284.544.739	4400,45	291.343.643	5900,00	294.169.076	3000,00	1.442.555.236	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan penyelenggaraan LLAJ yang disahkan	orang	N/A	N/A	283.027.397	N/A	283.772.763	150,00	288.544.739	200,00	291.343.643	250,00	294.169.076	250,00	1.442.555.236	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan penyelenggaraan LLAJ yang disahkan	orang	0%	0%	-	0%	-	0%	-	10%	800.000.000	20%	78.000.000	20%	375.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	0.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	500.000.000	1,00	-	1,00	500.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sosialisasi Rencana Indek Jaringgan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	0.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	penemuan jumlah perlempasan jalan yang dilakukan	persen	20%	25%	205.900.000	25%	3.616.730.000	27%	6.700.000.000	30%	6.500.000.000	32%	4.500.000.000	32%	21.522.650.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terlempar	unit	0.000	0,00	-	0,00	-	1,00	200.000.000	2,00	500.000.000	3,00	500.000.000	3,00	1.200.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terlempar	unit	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000.000.000	1.000	3.500.000.000	1.000	5.000.000.000	1.000	3.000.000.000	1.000	16.500.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03	Rehabilitasi dan Perbaikan Perlempasan Jalan	Jumlah Perlempasan Jalan yang Terlempar dan Diperbaiki	unit	0.000	0,00	205.900.000	0,00	1.167.900.000	2,00	1.900.000.000	2,00	1.000.000.000	2,00	1.000.000.000	2,00	3.802.550.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.01	Pengadaan Terminal Pemasangan Tipe C	Penyediaan rencana pembangunan terminal yang dipasang	persen	5%	5%	-	10%	141.582.900	18%	1.830.000.000	20%	2.200.000.000	25%	3.675.000.000	25%	7.806.582.900	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	unit	1.000	1,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	500.000.000	1,00	-	1,00	500.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sistem dan Prasarana Terminal	Jumlah Sistem dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangannya	unit	1.000	1,00	-	2,00	47.666.900	3,00	1.500.000.000	4,00	1.500.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	4.047.666.900	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Perbaikan Terminal (Pada/Isi Uras dan Perlempasan)	Jumlah Terminal (Facilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Diperbaiki	unit	1.000	1,00	-	1,00	-	2,00	250.000.000	3,00	100.000.000	4,00	75.000.000	4,00	425.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SOM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SOM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	orang	0.000	0,00	-	2,00	93.916.000	4,00	100.000.000	6,00	100.000.000	8,00	100.000.000	8,00	393.016.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05	Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Penyediaan layanan operasional pengujian berhala kendaraan bermotor	persen	5%	7%	151.200.000	9%	193.050.000	12%	1.125.000.000	15%	3.900.000.000	18%	5.725.000.000	18%	11.094.340.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berhala kendaraan Bermotor yang Terpasang	unit	0.000	0,00	-	0,00	-	1,00	750.000.000	3,00	3.500.000.000	4,00	5.000.000.000	4,00	9.280.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berhala kendaraan bermotor yang Ditingkatkan	orang	4.000	4,00	-	6,00	44.800.000	7,00	250.000.000	8,00	250.000.000	9,00	250.000.000	9,00	794.800.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.03	Regulasi Kendaraan Wajib Uji Berhala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berhala Kendaraan Bermotor	unit	100.000	100,00	151.200.000	100,00	44.600.000	150,00	75.000.000	150,00	75.000.000	150,00	100.000.000	150,00	445.890.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.04	Pengadaan Baki Lintas Uji Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Baki Lintas Uji Pengujian Berhala kendaraan Bermotor	dokumen	0.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	25.000.000	200,00	50.000.000	200,00	75.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berhala kendaraan Bermotor	laporan	0.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	laporan	0.000	0,00	-	1,00	60.450.000	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	60.450.000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.05.06	Keoptimalan Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kendaraan Bermotor	laporan	0.000	0,00	-	1,00	34.200.000	2,00	50.000.000	3,00	50.000.000	4,00	50.000.000	4,00	184.200.000	Dinas Perhubungan		

Kode	Isu/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sumbu Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Desa Capaian Pada Tahun Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pembiayaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode BEHRTA-PD		Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah		
				2021		2022		2023		2024		K	Rp.			K	Rp.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2.15.02.2.05.09	Persewaan Tarif Berhingga Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Laporan Keuangan (LK) yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Kabupaten/Kota	laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor	laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Managemen dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Meningkatkan Efisiensi Jalan	Persentase kinerja pengawasaan, pengendalian LLAJ	Persen	10%	256.725.000	140.100.000	728.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	1.050.000.000	3.024.825.000	3.024.825.000	3.024.825.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06.02	Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Penertiban Pemeliharaan Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Laporan Keuangan (LK) yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Kabupaten/Kota	unit	20,00	30,00	30,00	250.000.000	250.000.000	35,00	35,00	40,00	500.000.000	40,00	1.000.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Meningkatkan Efisiensi Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Meningkatkan Efisiensi Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000	1,00	1,00	2,00	100.000.000	2,00	150.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan untuk Meningkatkan Efisiensi Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	8/1	256.725.000	140.100.000	278.000.000	300.000.000	4,00	4,00	5,00	300.000.000	5,00	1.274.825.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.07	Penerapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kinerja AKDALALN	Persen	0%	0,00	1%	90.400.000	100.000.000	3%	3%	4%	100.000.000	4%	200.400.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor	Jumlah Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Kabupaten/Kota	orang	1.000	1.000	1,00	50.000.000	50.000.000	3,00	3,00	4,00	50.000.000	4,00	150.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Reklamasi dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	0,00	0,00	0,00	40.400.000	50.000.000	2,00	2,00	3,00	50.000.000	3,00	140.400.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kinerja Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	0%	0,00	0%	90.000.000	10%	10%	10%	150.000.000	10%	275.000.000	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur (LAJ) yang Ditugaskan	Jumlah Auditor dan Inspektur (LAJ) yang Ditugaskan	orang	0,00	0,00	1,00	90.000.000	90.000.000	2,00	2,00	3,00	75.000.000	3,00	200.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemeliharaan Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemeliharaan Persewaan Berhingga Kendaran Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase kinerja angkutan umum	Persen	20%	2.362.638.000	2.847.193.188	1.990.000.000	5.050.000.000	28%	28%	30%	5.075.000.000	30%	16.534.851.188	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09.01	Pengembangan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	100,00	140,00	160,00	1.000.000.000	1.000.000.000	170,00	170,00	180,00	5.000.000.000	180,00	16.409.851.188	DAS/DB II	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Keterwakilan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Keterwakilan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	0,00	0,00	0,00	50.000.000	50.000.000	1,00	1,00	2,00	75.000.000	2,00	125.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.10	Pencetakan Kawasan Persewaan untuk Pelayanan Angkutan Persewaan yang Melampai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase kawasan yang dilayani angkutan persewaan	Persen	5%	0,00	5%	290.000.000	10%	10%	13%	100.000.000	15%	350.000.000	DAU	Dinas Perhubungan		

Kode	Bantuan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA-PD		Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasangan Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			Lokasi
2.15.02.2.14.01	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Rencana Kawasan Perencanaan untuk Anggaran Perencanaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Kawasan Perencanaan untuk Anggaran Perencanaan Kabupaten/Kota	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.14.02	Bendahawan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Kawasan Perencanaan untuk Anggaran Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Kawasan Perencanaan untuk Anggaran Perencanaan Kabupaten/Kota	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.11	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	0%	0%	0%	5%	750.000.000	10%	100.000.000	15%	100.000.000	15%	1.000.000.000	15%	1.000.000.000	DAU	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11.01	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	750.000.000	0,00	1,00	750.000.000	1,00	750.000.000	1,00	750.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.11.02	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.11.03	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengaturan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.12	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	0%	0%	0%	0%	750.000.000	10%	150.000.000	15%	150.000.000	15%	500.000.000	15%	500.000.000	DAU	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.12.01	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perencanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	750.000.000	1,00	1,00	750.000.000	1,00	750.000.000	1,00	750.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.12.02	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.14	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Orang Asli Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	200.032.000	13%	280.000.000	30%	423.500.000	30%	542.532.000	30%	542.532.000	DAU	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.14.01	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Anggaran Orang Asli Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	0,000	0,00	0,00	0,00	200.032.000	13%	280.000.000	30%	423.500.000	30%	542.532.000	30%	542.532.000	DAU	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.14.02	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengaturan Pelaksanaan Anggaran Orang Asli Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.14.03	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perencanaan yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	Perencanaan	0%	0%	0%	0%	592.000.000	14%	125.000.000	15%	150.000.000	15%	825.000.000	15%	825.000.000	DAU	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16.01	Pembinaan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Orang Asli Trasyak Ferobek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan yang ditetapkan	dokumen	0,000	0,00	0,00	0,00	550.000.000	1,00	1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	DAU	Dinas Perhubungan	

Kode	Isiura/Program/Kegiatan/Sab Kegiatan	Indikator Kinerja	Situs Indikator	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENCANA-PD		Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasang/Instansi		
				2021		2022		2023		2024				2025	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
2.15.02.2.16.02	Perencanaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0,000	-	0,00	-	1,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	100.000.000	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	0,000	-	0,00	-	1,00	75.000.000	2,00	100.000.000	2,00	175.000.000	Dinas Perhubungan	
3.10.03	Program Pengabdian Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan/kelompok masyarakat	persen	N/A	743.241.000	30	757.725.807	50	765.079.786	60	772.501.060	60	3.789.002.091	Dinas Perhubungan	
		Persentase layanan angkutan sungai dan penyeberangan yang sudah terintegrasi	persen	N/A	743.241.000	60	757.725.807	70	765.079.786	75	772.501.060	75	3.789.002.091	Dinas Perhubungan	
		Arus belajar mulai belajar kapal yang terintegrasi dengan jalur transportasi sungai dan penyeberangan yang terintegrasi dengan jalur transportasi sungai	ton	N/A	495.494.000	776	505.153.305	865	510.053.191	965	515.000.707	1.200	2.836.001.305	Dinas Perhubungan	
3.10.03.2.03	Penerbitan Iklan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang diterbitkan	orang	N/A	495.494.000	1.046	505.153.305	1.447	510.053.191	2.000	515.000.707	2.000	2.836.001.305	Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penunahan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	persen	N/A	127.730.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	1.300.058.000	Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pelaksanaan Uji Coba Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	laporan	3	127.730.000	1	150.000.000	3	150.000.000	4	150.000.000	4	377.730.000	Dinas Perhubungan	
2.10.03.2.04	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi dan Danau yang Meliputi Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan proyek yang berhasil	persen	10%	-	10%	-	15%	75.000.000	20%	80.000.000	20%	155.000.000	Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.04.01	Realisasi Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Pelebaran Sungai dan Danau yang Meliputi Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penunahan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Dukungannya di Daerah Kabupaten/Kota	dukumen	-	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	100.000.000	Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.04.02	Konektivitas dan Sinergi Penyelenggaraan Pelebaran dan Pelebaran Sungai dan Danau yang Meliputi Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pelebaran dan Pelebaran Sungai dan Danau yang Meliputi Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	laporan	-	-	-	-	-	25.000.000	-	30.000.000	-	55.000.000	Dinas Perhubungan	

Kode	Agenda/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENCANA PD	Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.15.03.2.05	Pencapaian Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang dirijikan	persen	0%	0%	10%	45.000.000	20%	35.000.000	20%	100.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.05.01	Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Perbaikan Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pelayanan Perbaikan Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	15.000.000	2	25.000.000	2	40.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Unit Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota	laporan	-	-	1	30.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.07	Pencapaian Unit Usaha Penyelenggaraan dan Peningkatan Pengawasan untuk Kapal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Angkutan Penyeberangan	persen	-	-	10%	50.000.000	20%	80.000.000	20%	130.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pencapaian Pengawasan untuk Kapal yang Melayari Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetapkannya Pengawasan untuk Kapal yang Melayari Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	30.000.000	2	30.000.000	2	100.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pencapaian Pengawasan untuk Kapal yang Melayari Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetapkannya Pengawasan untuk Kapal yang Melayari Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.08	Pencapaian Unit Usaha Jasa terkait dengan Peningkatan dan Perbaikan Kapal	Persentase jumlah unit usaha perantara dan perbaikan kapal	persen	0%	0%	10%	20.000.000	20%	25.000.000	20%	45.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.08.01	Penyediaan Pemenuhan Pelayanan Perbaikan Unit Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perbaikan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pelayanan Perbaikan Unit Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perbaikan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen	-	-	1	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.08.02	Kuantitas dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Unit Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Unit Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	laporan	-	-	1	15.000.000	2	20.000.000	2	35.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.09	Pencapaian Tarif Angkutan Penyeberangan Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kemandirian beserta Mula-mula pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Angkutan Penyeberangan	persen	0%	0%	5%	80.000.000	7%	117.000.000	7%	197.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.09.01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kemandirian beserta Mula-mula pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kemandirian beserta Mula-mula pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	30.000.000	2	35.000.000	2	125.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.09.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kemandirian beserta Mula-mula pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Kemandirian beserta Mula-mula pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	5.000.000	2	7.000.000	2	12.000.000	Boven Digoel	DAU	Dinas Perhubungan		

Kode	Agenda/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal		2021		2022		2023		2024		2025		Lokasi	Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
2.15.03.2.09.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan dan Pengawasan Pemungutan Kekas Ekonomi dan Rendah: berupa Mutakhirnya pada Lintas Penyelenggaraan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan dan Pengawasan Pemungutan Kekas Ekonomi dan Rendah: berupa Mutakhirnya pada Lintas Penyelenggaraan Antar Daerah Kabupaten/Kota	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	2	39.000.000	2	60.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.10.01	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelanggaran Pengumpulan Lokal	Persentase pelaksanaan pada operasional pelabuhan lokal yang dirampai	persen	0%	-	0%	-	5%	3.553.600.000	7%	3.603.600.000	2	3.653.600.000	10%	3.653.600.000	10%	10.810.800.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.10.02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelanggaran Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelanggaran Pengumpulan Lokal	dokumen	-	-	1	3.353.600.000	2	3.353.600.000	2	3.353.600.000	3	3.353.600.000	3	10.560.800.000	3	10.560.800.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.10.03	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelanggaran Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) Pelanggaran Pengumpulan Lokal	dokumen	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR / DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pelaksanaan pada operasional pelabuhan sungai dan danau	persen	0%	-	0%	-	5%	1.500.000.000	10%	1.500.000.000	10%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000	15%	4.500.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	dokumen	-	-	-	-	1	1.500.000.000	2	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	4.500.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12	Pembangunan, Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Persentase pelaksanaan pada pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan lokal	persen	5%	-	5%	-	10%	6.700.000.000	15%	6.800.000.000	20%	6.800.000.000	20%	14.800.000.000	20%	33.073.260.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12.01	Penyusunan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	dokumen	-	-	-	-	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	6.000.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12.02	Pembangunan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Lokal yang Dirampai	unit	-	-	-	-	1	4.000.000.000	2	5.000.000.000	3	10.000.000.000	3	19.000.000.000	3	39.000.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12.03	Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Lokal yang Beroperasi dan Terpelaksana	unit	-	-	1	3.673.260.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	8.173.260.000	3	8.173.260.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12.04	Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	laporan	-	-	-	-	1	200.000.000	2	300.000.000	5	300.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.12.02	Pembangunan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Persentase pelaksanaan sungai yang beroperasi	persen	35%	267.720.000	37%	14.400.000	39%	325.000.000	40%	280.000.000	42%	850.000.000	42%	1.367.120.000	42%	1.367.120.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.13.03	Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Pelaksanaan Sungai dan Danau yang Dirampai	unit	3	2.043.980.000	4	14.400.000	5	5.000.000.000	6	5.000.000.000	7	5.000.000.000	7	17.043.980.000	7	17.043.980.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.13.04	Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengawasan Pelaksanaan Sungai dan Danau	laporan	1	14.622.000	1	14.400.000	2	25.000.000	3	30.000.000	4	50.000.000	4	119.622.000	4	119.622.000	Dinas Perhubungan		
2.15.03.2.14	Pencapaian dan Pelaksanaan Pembangunan Lokal	Persentase pelaksanaan untuk pembangunan yang direncanakan	persen	N/A	-	N/A	-	N/A	85.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	185.000.000	Dinas Perhubungan		

Kode	Agenas/ Tujuan/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Besaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RERFRA-1D		Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023		2024				2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
2.15.03.2.14.01	Fasilitasi Pemertan Perencanaan, Penelitian dan Usaha untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemertan Perencanaan Penelitian dan Usaha untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	document	0%	-	-	-	1	30.000.000	2	50.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal yang ditelaah	laporan	0%	-	-	-	-	35.000.000	-	50.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.15.01	Pemertan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Perizinan lain pengurusan yang ditelaah	persen	0%	-	-	-	20%	575.000.000	30%	550.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.15.02	Fasilitasi Pemertan Perencanaan Penelitian dan Usaha untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemertan Perencanaan Penelitian dan Usaha untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditelaah	document	-	-	-	-	1	75.000.000	2	80.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.15.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan yang ditelaah	laporan	-	-	-	-	1	500.000.000	2	500.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.17.01	Fasilitasi Pemertan Perencanaan Penelitian dan Usaha untuk Studi Usaha Pelibahan di Kabupaten Pangkep Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan lain pengurusan yang ditelaah	persen	N/A	-	-	-	N/A	-	80%	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.17.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan yang ditelaah	laporan	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.18.01	Pemertan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Perizinan lain pelibahan yang ditelaah	persen	N/A	-	-	-	N/A	-	50%	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.18.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan yang ditelaah	laporan	N/A	-	-	-	N/A	-	1	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.19.01	Pemertan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Perizinan lain pengurusan yang ditelaah	persen	2	-	-	-	3	50.000.000	3	75.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.03.2.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lain Pengawasan Pelibahan untuk Pelibahan yang ditelaah	laporan	-	-	-	-	1	50.000.000	3	100.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.04	Program Pengujian Penerimaan	Jumlah laporan terbagi yang diterima dalam kondisi baik	unit	0	649.084.192	1	857.318.259	2	555.634.277	3	594.035.979	DAU	Dinas Perhubungan			
		Perizinan lain pengurusan yang ditelaah	persen	90	566.034.795	75,00	571.545.626	80,00	577.089.318	85,00	582.687.289	DAU	Dinas Perhubungan			
		Aras Penumpang	Orang	2640	283.027.397	3408	285.772.763	3873	288.544.799	4400	291.343.543	DAU	Dinas Perhubungan			
		Aras Barang	ton	N/A	283.027.397	N/A	285.772.763	130	286.544.799	200,00	291.343.543	DAU	Dinas Perhubungan			
2.15.04.2.01	Pemertan lain Mendirikan Bangunan Tempat Pendaftaran dan Lupa Lupa	Perizinan lain pengurusan yang ditelaah	persen	N/A	-	-	-	30%	180.000.000	40%	180.000.000	DAU	Dinas Perhubungan			

Kode	Basis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Agenda/Tujuan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENCANA PD	Lokasi	Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2.15.04.2.01.01	Fasilitasi dan Mendorong Bangunan Tempel Pendaratan dan Kapal Landas Helikopter		Jumlah Dukungan dan Mendorong Tempel Pendaratan dan Kapal Landas Helikopter yang Mendorong Helikopter yang Diterbitkan	dukumen	0,000	0,00	-	1,00	150.000.000	250.000.000	3,00	150.000.000	3,00	350.000.000	3,00	350.000.000	Boven Digel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.04.2.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi		Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Udara yang Disediakan	persen	N/A	13%	173.200.000	18%	2.000.000.000	2.500.000.000	22%	2.500.000.000	22%	2.500.000.000	23%	2.500.000.000	Boven Digel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.04.2.02.01	Persediaan Sarana dan Prasarana Bandara Internasional		Jumlah Fasilitas Lapangan Terbang yang Tersedia	unit	0,000	0,00	173.200.000	4,00	1.500.000.000	2.000.000.000	8,00	2.000.000.000	8,00	2.000.000.000	10,00	5.673.300.000	Boven Digel	DAU	Dinas Perhubungan		
2.15.04.2.02.02	Pengadaan Bandara, Lapangan Udara		Jumlah Lapangan Terbang yang Tersedia	unit	0,000	1,00	-	1,00	500.000.000	800.000.000	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	2,00	2.467.531.999	Boven Digel	DAU	Dinas Perhubungan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Kinerja adalah capaian / keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Boven Digoel maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Boven Digoel, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi darat yang disusun	N/A	1 dok	2 dok	3 dok	5 dok	7 dok	
2.	Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi sungai yang disusun	N/A	1 dok	1 dok	3 dok	4 dok	5 dok	
3.	Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas transportasi udara yang disusun	N/A	N/A	N/A	1 dok	2 dok	3 dok	
4.	Jumlah sarana/moda angkutan darat yang disediakan	38 unit	40 unit	43 unit	46 unit	50 unit	60 unit	
5.	Jumlah sarana/moda perairan yang disediakan	35 unit	40 unit	50 unit	60 unit	70 unit	80 unit	
6.	Jumlah terminal yang dibangun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	
7.	Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang dibangun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	
8.	Jumlah halte yang dibangun	N/A	N/A	N/A	1 unit	2 unit	3 unit	
9.	Jumlah pos pengawasan LLAJ yang dibangun	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	4 unit	
10.	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang	50 unit	50 unit	70 unit	80 unit	100 unit	100 unit	
11.	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)/Traffic Light yang dipasang	N/A	N/A	N/A	2 unit	3 unit	3 unit	
12.	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dipasang	213 unit	213 unit	313 unit	400 unit	450 unit	450 unit	
13.	Persentase alat uji kendaraan (Uji KIR) yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
14.	Jumlah pelabuhan/dermaga beton yang dibangun	4 unit	5 unit	5 unit	6 unit	6 unit	6 unit	

No.	Indikator Kinerja Utama Peringkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15.	Jumlah jenis fasilitas pelabuhan/dermaga yang diadakan	N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	2 unit	
16.	Jumlah terminal yang ditingkatkan dan direhabilitasi	N/A	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
17.	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang direhabilitasi	N/A	N/A	50 unit	70 unit	80 unit	80 unit	
18.	Jumlah Lampu Pencerangan Jalan Umum (LPJU) yang direhabilitasi	N/A	80 unit	150 unit	200 unit	250 unit	250 unit	
19.	Jumlah pelabuhan/ dermaga yang ditingkatkan dan direhabilitasi	N/A	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	4 unit	
20.	Persentase lapangan terbang yang ditingkatkan dan direhabilitasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Persentase jumlah distrik yang bisa diakses dengan transportasi darat, sungai dan udara	N/A	95%	95%	95%	100%	100%	
22.	Prosesante trayek angkutan kota yang terlayani angkutan umum	N/A	10%	12%	13%	15%	15%	
23.	Prosesante trayek angkutan pedesaan yang terlayani angkutan umum	N/A	23%	25%	30%	35%	35%	
24.	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati yang disusun	N/A	1 dok	2 dok	3 dok	3 dok	3 dok	
25.	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang disusun	N/A	N/A	2 dok	3 dok	4 dok	4 dok	
26.	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan pelayaran yang disusun	N/A	N/A	1 dok	2 dok	3 dok	3 dok	
27.	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan penerbangan yang disusun	N/A	N/A	N/A	1 dok	2 dok	2 dok	
28.	Persentase jumlah kampung yang bisa diakses dengan transportasi darat, sungai dan udara	60%	67%	68%	70%	75%	75%	
29.	Persentase kendaraan angkutan umum yang diuji	N/A	N/A	N/A	30%	50%	50%	



No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
30.	Persentase pelabuhan yang beroperasi dengan baik	43%	50%	60%	70%	80%	80%	
31.	Boven Digoel Kontribusi PAD Sektor Perhubungan terhadap PAD Kabupaten Boven Digoel	N/A	0,6%	1%	1,2%	1,5%	1,5%	
32.	Jumlah forum koordinasi penyelenggaran, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan	N/A	N/A	2 kali	3 kali	4 kali	4 kali	
33.	Persentase frekuensi penerbangan perintis penumpang yang beroperasi	70%	90%	100%	100%	100%	100%	
34.	Persentase penerbangan perintis barang yang beroperasi	70%	90%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2020 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	
(1)	(2)								
1.	Boven Digoel memenuhi operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Boven Digoel dermaga dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	30	40	50	60	60	60
3.	Boven Digoel layanan angkutan sungai dan penyeberangan yang sesuai standar	persen	N/A	60	65	70	75	75	75
4.	Arus bongkar muat barang kapal yang terlayani dengan baik	ton	N/A	776	865	965	1.200	1.200	1.200
5.	Jumlah penumpang angkutan sungai dan penyeberangan yang terlayani dengan baik	orang	N/A	1.046	1.230	1.447	2.000	2.000	2.000
6.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km per kendaraan	0,00471	0,0089	0,0122	0,0167	0,0230	0,0230	0,0230
7.	Boven Digoel rambu-rambu LLAJ yang terpasang dan berfungsi baik	persen	N/A	75	80	85	90	90	90
8.	Rasio ijin trayek	per penduduk	N/A	0,00031	0,00078	0,00079	0,0050	0,0050	0,005
9.	Jumlah terminal angkutan darat yang berfungsi dalam kondisi baik	unit	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1

BAB VIII PENUTUP

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dan subkegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Dinas Perhubungan ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

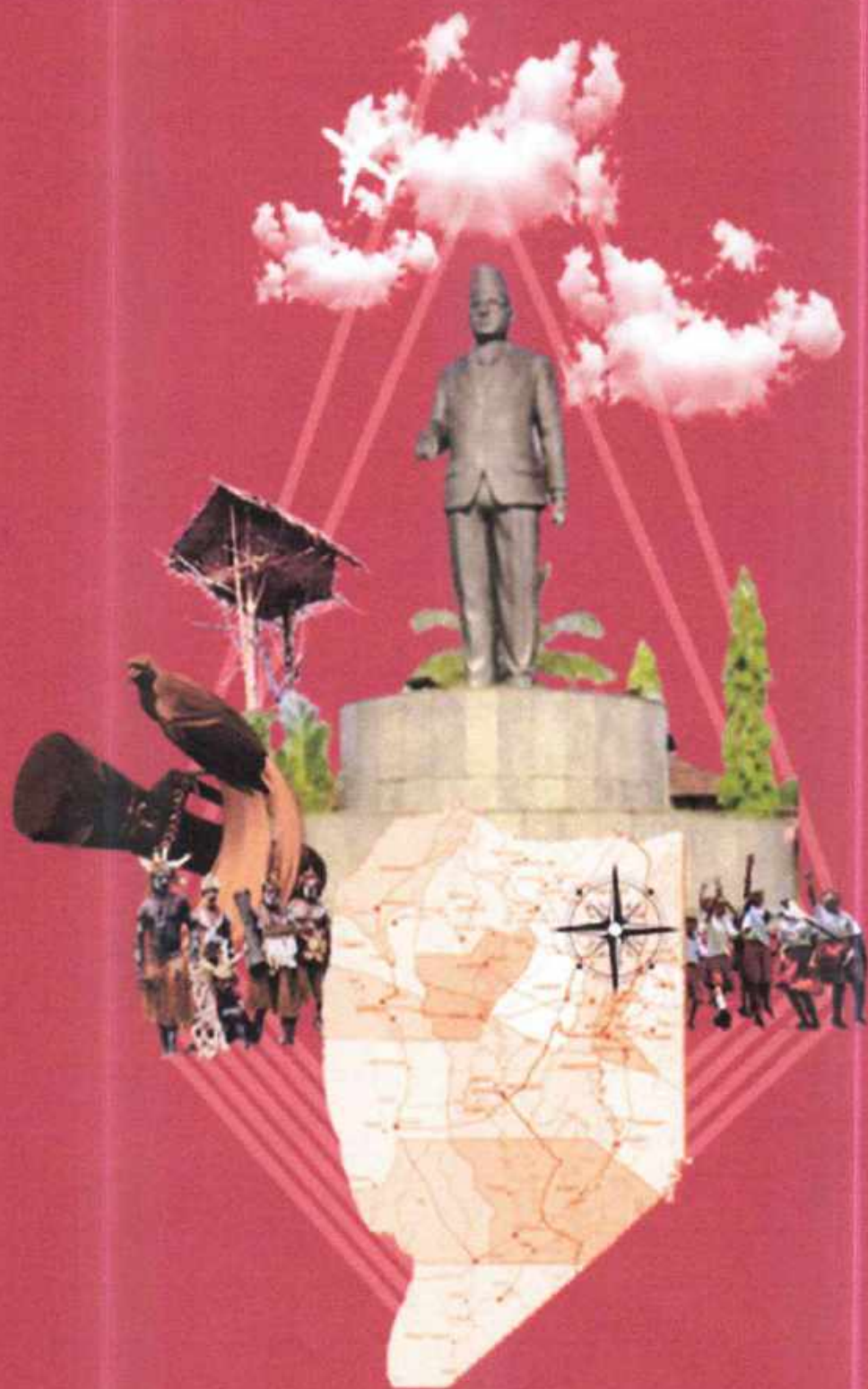
Tanah Merah, 09 November 2022

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Boven Digoel**



LUSIUS APAYMAN, SH.,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 197200603 200112 1 005



BOVEN
DIGOEL
2022

